

Nama : Boni Morana Situmorang
NPM : 2213031002
Kelas : 2022 A
Mata Kuliah : Ekonomi Industri

Studi Kasus Pertemuan 9

STUDI KASUS:

”Indonesia sedang menghadapi tantangan deindustrialisasi dini, di mana kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB menurun meskipun pendapatan per kapita belum mencapai level negara maju. Di sisi lain, pemerintah Indonesia telah meluncurkan kebijakan Making Indonesia 4.0 sebagai upaya revitalisasi industri nasional, dengan fokus pada lima sektor prioritas: makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia. Namun, setelah lima tahun implementasi, pertumbuhan sektor-sektor tersebut belum signifikan. Sementara itu, negara-negara seperti Vietnam dan Bangladesh justru menunjukkan peningkatan pesat dalam sektor manufakturnya.”

1. Analisislah kemungkinan penyebab kegagalan implementasi kebijakan Making Indonesia 4.0 dalam mendorong pertumbuhan industri prioritas. Gunakan teori-teori kebijakan industri sebagai dasar analisis Anda.

Jawaban:

Kegagalan relatif kebijakan Making Indonesia 4.0 dalam mendorong pertumbuhan sektor prioritas dapat dipahami melalui teori kebijakan industri, terutama teori kapabilitas, rantai nilai global, dan pendekatan negara pembangunan. Secara konseptual, Making Indonesia 4.0 terlalu menitikberatkan pada modernisasi teknologi tanpa terlebih dahulu memastikan kesiapan kapabilitas dasar industri baik dari sisi keterampilan tenaga kerja, produktivitas pemasok lokal, maupun kapasitas manajerial perusahaan. Akibatnya, adopsi teknologi bersifat parsial dan tidak menghasilkan peningkatan nilai tambah yang signifikan. Selain itu, insentif investasi tidak disertai persyaratan yang ketat terkait transfer teknologi, peningkatan local content, atau program R&D sehingga investasi asing lebih banyak beroperasi sebagai pusat perakitan, bukan pusat produksi bernilai tinggi. Hambatan institusional seperti koordinasi antar-kementerian yang lemah, birokrasi perizinan, dan infrastruktur logistik yang belum memadai semakin menghambat efektivitas kebijakan ini. Sudut pandang teori GVC juga menjelaskan bahwa Indonesia belum menempatkan dirinya pada

segmen yang lebih menguntungkan dalam rantai nilai global; akibatnya, sekalipun volume industri meningkat, kontribusi terhadap PDB dan produktivitas tidak tumbuh. Semua faktor ini menunjukkan bahwa kegagalan implementasi bukan terletak pada visi kebijakan, melainkan pada kurangnya fondasi kapabilitas, insentif yang tidak terikat kinerja, dan lemahnya mekanisme koordinasi serta evaluasi jangka panjang.

2. Bandingkan pendekatan kebijakan industri Indonesia dengan negara lain seperti Vietnam atau Korea Selatan. Apa yang membedakan efektivitas kebijakan mereka?

Jawaban:

Perbandingan dengan Vietnam menunjukkan bahwa negara tersebut berhasil menarik FDI manufaktur besar-besaran karena memiliki kebijakan yang lebih terkoordinasi, berorientasi ekspor, dan didukung zona industri yang terintegrasi. Vietnam tidak hanya menawarkan insentif investasi, tetapi juga memastikan bahwa seluruh ekosistem logistik, tenaga kerja terampil, dan hubungan pemerintah–investor berjalan terpadu, sehingga menciptakan kepastian dan efisiensi produksi. Sementara itu, Korea Selatan menjadi contoh klasik negara pembangunan yang menekankan selektivitas sektor, insentif berbasis kinerja, pembangunan kapabilitas teknologi nasional, dan kedisiplinan birokrasi dalam mengawal implementasi. Perbedaan utama dibanding Indonesia terletak pada konsistensi, koordinasi, dan fokus pada penciptaan kapabilitas lokal, bukan sekadar menarik investasi atau membeli teknologi. Indonesia cenderung menekankan roadmap dan inovasi teknologi tanpa memastikan kesiapan struktur industri dan daya saing dasar, sedangkan Vietnam dan Korea mengombinasikan strategi investasi, ekspor, peningkatan kapabilitas, serta tata kelola negara yang efektif sehingga kebijakan industrinya menghasilkan pertumbuhan yang lebih nyata.

3. Berdasarkan hasil analisis Anda, rancanglah kebijakan industri alternatif yang lebih kontekstual untuk Indonesia agar mampu keluar dari jebakan deindustrialisasi dini. Jelaskan rasional dan instrumen kebijakan yang digunakan.

Jawaban:

Kebijakan industri alternatif yang lebih kontekstual bagi Indonesia perlu berfokus pada pembangunan kapabilitas domestik dan bukan sekadar adopsi teknologi. Langkah awal adalah mendefinisikan kembali posisi Indonesia dalam rantai nilai global untuk setiap sektor prioritas, sehingga intervensi pemerintah menjadi lebih terarah dan realistik. Kebijakan selanjutnya harus mengadopsi insentif berbasis kinerja, di mana fasilitas

fiskal dan kemudahan investasi hanya diberikan jika perusahaan memenuhi target seperti peningkatan local content, kolaborasi R&D, dan transfer teknologi. Pemerintah juga perlu membangun program peningkatan pemasok lokal melalui pembiayaan cluster, sertifikasi mutu, dan pelatihan teknis agar UKM dapat terhubung dengan produsen besar, termasuk investor asing. Investasi negara pada pendidikan vokasi, laboratorium industri, dan penelitian terapan menjadi fondasi penting agar proses upgrading berjalan berkelanjutan. Di sisi lain, penguatan peran pemerintah sebagai koordinator melalui unit khusus yang mengawasi implementasi kebijakan industri, mempercepat perizinan, serta memastikan konsistensi antar-kementerian diperlukan agar transformasi struktural tidak terhenti di tengah jalan. Dengan kombinasi instrumen insentif yang bersyarat, pengembangan rantai pasok, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan tata kelola kebijakan yang kuat, Indonesia berpeluang keluar dari jebakan deindustrialisasi dini dan membangun manufaktur bernilai tambah tinggi yang berkelanjutan.